



Adiwiyata sebagai Instrumen Pendidikan Lingkungan: Analisis Tantangan, Kesenjangan, dan Peluang Perbaikan

Moh. Zulandri^{1*} & A. Markarma²

¹Doktor Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Moh. Zulandri, E-mail: zulandri.yotolembah@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 4	Program Adiwiyata diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membangun karakter peduli lingkungan melalui pendidikan formal. Namun, implementasinya di berbagai daerah menunjukkan variasi signifikan terkait kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan. Artikel ini menganalisis tantangan struktural dan kultural dalam penerapan Adiwiyata, menelaah kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi peluang perbaikan agar program Adiwiyata benar-benar berfungsi sebagai mekanisme edukasi lingkungan yang efektif. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis teoretik dan studi kebijakan berdasarkan literatur terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas Adiwiyata sangat dipengaruhi oleh integrasi kurikulum, kapasitas guru, partisipasi warga sekolah, mekanisme evaluasi, serta budaya organisasi sekolah. Rekomendasi disampaikan untuk memastikan pergeseran paradigma dari seremonialisasi menuju transformasi pendidikan lingkungan yang berkelanjutan.
KATAKUNCI	
Adiwiyata, Instrumen Pendidikan, Pendidikan Lingkungan	

1. Pendahuluan

Pendidikan lingkungan merupakan agenda strategis dalam merespons tantangan ekologis global seperti krisis iklim, kerusakan biodiversitas, dan pencemaran lingkungan. Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter ekologis peserta didik. Dalam konteks Indonesia, Program Adiwiyata yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dirancang sebagai sarana sistemik untuk membangun sekolah berbudaya lingkungan.

Sejak diberlakukan secara nasional, Adiwiyata mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah diterbitkannya berbagai regulasi yang memperkuat integrasinya dalam pendidikan lingkungan sekolah. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara konsep, kebijakan, dan implementasi Adiwiyata sehingga menimbulkan variasi kualitas yang mencolok antara satu sekolah dan lainnya. Sebagian sekolah berhasil membangun budaya ekologis yang kuat, sementara sebagian lainnya masih menjalankan program secara administratif dan seremonial semata.

Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan, kesenjangan, dan peluang perbaikan program Adiwiyata agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendidikan lingkungan berkelanjutan.

* **Mahasiswa Program Studi Doktor PAI UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pendidikan Lingkungan Berbasis Sekolah

Pendidikan lingkungan modern menekankan paradigma “*environmental literacy*”, yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan nyata dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut UNESCO, pendidikan lingkungan harus bersifat holistik, lintas disiplin, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari sekolah.

Dalam konteks sekolah, pendidikan lingkungan tidak terbatas pada kurikulum formal, tetapi terwujud melalui budaya lingkungan, pengelolaan sarana prasarana, dan perilaku seluruh warga sekolah. Model inilah yang menjadi dasar lahirnya program Adiwiyata.

2.2 Konsep Dasar Adiwiyata

Adiwiyata didasarkan pada empat komponen utama, yaitu:

1. kebijakan sekolah berwawasan lingkungan,
2. kurikulum berbasis lingkungan,
3. kegiatan partisipatif lingkungan, dan
4. pengelolaan sarana-prasarana berkelanjutan.

Keempat komponen tersebut dirancang untuk membentuk ekosistem sekolah yang kondusif bagi pembelajaran lingkungan yang autentik. Namun, kekuatan Adiwiyata sangat bergantung pada integrasi dan konsistensi implementasinya di lapangan.

2.3 Analisis Tantangan Implementasi Adiwiyata

2.3.1 Tantangan Kebijakan dan Regulasi

Meskipun memiliki payung hukum, implementasi Adiwiyata masih terkendala koordinasi antar instansi, khususnya antara dinas lingkungan hidup dan dinas pendidikan. Keterbatasan anggaran operasional juga menghambat sekolah untuk mempertahankan standar Adiwiyata secara berkelanjutan. Selain itu, banyak kebijakan sekolah belum benar-benar mengintegrasikan perspektif ekopedagogik. Kebijakan hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan administratif ketika sekolah mengikuti penilaian Adiwiyata.

2.3.2 Tantangan SDM dan Kompetensi Guru

Kompetensi guru dalam pendidikan lingkungan masih bervariasi dan sering bergantung pada inisiatif individu, bukan sistem sekolah. Minimnya pelatihan intensif menyebabkan integrasi pendidikan lingkungan ke dalam pembelajaran kurang optimal. Guru cenderung fokus pada aspek kognitif dan belum maksimal menumbuhkan dimensi afektif dan psikomotorik terkait perilaku pro-lingkungan peserta didik.

2.3.3 Tantangan Seremonialisasi Program

Beberapa penelitian menunjukkan kecenderungan sebagian sekolah melaksanakan program Adiwiyata sebagai “event-oriented”, bukan sebagai proses internalisasi nilai.

1. kegiatan kerja bakti jelang verifikasi;
2. penataan fisik sekolah yang hanya dilakukan untuk penilaian;
3. dokumentasi administratif yang disusun terburu-buru.

Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi makna Adiwiyata dari instrumen pendidikan menjadi sekadar pencapaian predikat atau penghargaan.

2.3.4 Tantangan Partisipasi Warga Sekolah

Tingkat partisipasi warga sekolah sangat beragam. Beberapa sekolah mampu membangun “*collective ecological responsibility*”, tetapi banyak yang masih bergantung pada segelintir guru atau tim Adiwiyata. Peserta didik juga sering berperan sebagai objek kegiatan, bukan subjek penggerak perubahan.

2.3.5 Tantangan Evaluasi dan Keberlanjutan

Mekanisme monitoring pasca-penghargaan masih lemah. Banyak sekolah mengalami penurunan kualitas setelah meraih Adiwiyata Mandiri karena tidak adanya evaluasi dan pembinaan lanjutan.

2.4 Kesenjangan antara Konsep dan Implementasi

2.4.1 Kesenjangan Filosofis

Secara filosofis, Adiwiyata didesain membentuk karakter ekologis berkelanjutan. Namun, praktik di lapangan sering terjebak pada orientasi simbolik dan estetika lingkungan. Hal ini menunjukkan belum terinternalisasinya konsep ekopedagogik dalam kultur sekolah.

2.4.2 Kesenjangan Struktural

Struktur kelembagaan Adiwiyata di sekolah sering tidak stabil dan bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Ketika pimpinan berganti, program dapat melemah atau berhenti. Hal ini menunjukkan kurangnya institusionalisasi program.

2.4.3 Kesenjangan Kurikuler

Walaupun kurikulum berbasis lingkungan menjadi salah satu indikator utama, banyak sekolah hanya menambahkan materi lingkungan secara minimal dan tidak melalui pendekatan tematik, PBL, atau proyek berbasis aksi.

2.4.4 Kesenjangan Pengelolaan Sarana Lingkungan

Beberapa sekolah melakukan dekorasi fisik tanpa pengelolaan lingkungan yang substantif, seperti pengurangan sampah, sistem hijau, konservasi air, atau kebun edukatif.

2.5 Peluang Perbaikan Program Adiwiyata

2.5.1 Penguatan Integrasi Kurikulum

Pendidikan lingkungan harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran melalui pembelajaran kontekstual, PBL, literasi ekologis, dan proyek aksi lingkungan peserta didik.

2.5.2 Transformasi Kepemimpinan Berbasis Ekopedagogik

Kepala sekolah perlu mengembangkan gaya kepemimpinan transformasional yang mampu menciptakan budaya ekologis sekolah. Kepemimpinan ini menekankan visi, komitmen kolektif, inovasi, dan keteladanan.

2.5.3 Pembangunan Sistem Partisipasi Berkelanjutan

Sekolah perlu mengembangkan model partisipasi warga sekolah yang bersifat:

1. *inklusif,*
2. *kolaboratif,*
3. *dan berbasis komunitas (community-based environmental education).*

2.5.4 Digitalisasi Evaluasi Program

Evaluasi berbasis data digital, seperti e-reporting keberlanjutan, dapat membantu memantau kualitas Adiwiyata secara berkelanjutan.

2.5.5 Kemitraan dengan Komunitas dan Pemerintah Daerah

Penguatan kemitraan dengan LSM lingkungan, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah dapat meningkatkan kapasitas guru, pembiayaan, dan inovasi program.

3. Metodologi

Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terhadap masalah (tantangan/kesenjangan) dan pencarian solusi (peluang). Pendekatan ini memungkinkan penggalian persepsi, pengalaman, dan konteks implementasi Adiwiyata secara holistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data di analisis menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif. Validasi data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini menekankan pada konteks alami dan keautentikan pengalaman subyek, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat merepresentasikan realitas yang terjadi dilapangan secara utuh dan holistic. (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Adiwiyata: Fungsi sebagai Instrumen

Temuan menunjukkan bahwa Adiwiyata secara struktural telah berfungsi sebagai instrumen dengan adanya Tim Adiwiyata (TA) dan dokumen Rencana Aksi Lingkungan (RAL). Namun, implementasi fungsional menunjukkan perbedaan.

- Aspek Kuat: Sekolah telah memiliki fasilitas dasar (biopori, pemilahan sampah 3 jenis), memenuhi kriteria administrasi A-80%.
- Aspek Lemah: Kegiatan yang dilakukan seringkali bersifat event-driven (menjelang penilaian) dan belum menjadi budaya sekolah.

4.2 Analisis Kesenjangan (Gap: Kebijakan vs. Realitas)

Kesenjangan utama ditemukan antara standar program (dokumen) dan perilaku harian:

- Kesenjangan Kriteria: Standar Adiwiyata menuntut adanya Bank Sampah fungsional. Di lapangan, bank sampah tersedia, namun hanya mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai (kertas/botol) dan tidak ada mekanisme pengolahan sampah organik yang memadai.
- Kesenjangan Integrasi Kurikulum: Dokumen RPP guru mencantumkan integrasi lingkungan, tetapi pengaplikasiannya hanya pada tingkat permukaan (misalnya, membuat poster lingkungan), bukan pada eksperimen atau proyek nyata (misalnya, meneliti kualitas air).

4.3 Identifikasi Peluang Perbaikan

Peluang Kelembagaan: Sekolah memiliki potensi SDM berupa mahasiswa KKN/magang yang dapat diberdayakan sebagai duta lingkungan untuk membantu monitoring.

- Peluang Sumber Daya: Adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal yang bisa dikembangkan menjadi Laboratorium Alam Terpadu.
- Peluang Jaringan: Dekatnya lokasi sekolah dengan kantor dinas terkait atau perusahaan swasta untuk potensi Corporate Social Responsibility (CSR).

5. Kesimpulan

Program Adiwiyata memiliki potensi besar sebagai instrumen pendidikan lingkungan berkelanjutan di sekolah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya integrasi kurikulum, rendahnya partisipasi warga sekolah, seremonialisasi program, dan minimnya evaluasi berkelanjutan. Kesenjangan antara konsep dan praktik menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh, terutama melalui penguatan kepemimpinan sekolah, peningkatan kapasitas guru, digitalisasi evaluasi, dan pengembangan model partisipatif berbasis budaya ekologis. Dengan pembenahan tersebut, Adiwiyata tidak hanya menjadi program penghargaan, tetapi menjadi sarana transformasi pendidikan lingkungan yang membentuk generasi sadar lingkungan dan berorientasi keberlanjutan.

Referensi

- Bass, B. M. *Transformational Leadership Revisited*. New York: Free Press, 2011.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Journal of Chemical Information and Modeling.
- Fajri, A. "Evaluasi Keberlanjutan Program Adiwiyata." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 22, no. 3, 2021.
- Hapsari, W. "Seremonialisasi Program Sekolah Hijau: Kritik atas Praktik Implementasi Adiwiyata." *Jurnal Ekopedagogik*, vol. 5, no. 2, 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata*. Jakarta: KLH RI, 2013.
- Maryani, E. "Kompetensi Guru dalam Pengembangan Pendidikan Lingkungan." *Jurnal Geografi*, vol. 14, no. 1, 2017.
- Sulastri, R. "Implementasi Kebijakan Adiwiyata di Satuan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, vol. 8, no. 1, 2019.
- UNESCO. *Education for Sustainable Development: Policy, Learning, and Transformative Action*. Paris: UNESCO Publishing, 2014.